

Pelaksanaan pengurusan dan pemberesan boedel pailit berkaitan dengan kompetensi, tugas dan wewenang kurator = The implementation of administration and settlement of bankruptcy estate relates to competency, duties and authority of curator / Cakra Tirta Perkasa

Cakra Tirta Perkasa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349104&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sebagai seorang profesional dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kurator harus secara kritis mencermati bahwa setiap langkah yang diambil dalam rangka pelaksanaan penugasannya, memiliki dasar yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan pelaksanaannya serta menempuh prosedur Standar Profesi. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dengan demikian Kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Mengingat peran Kurator yang sangat penting, maka Kreditor dalam melakukan pengusulan Kurator haruslah dilakukan dengan cermat dan seksama agar Kurator yang diusulkan memiliki kompetensi serta profesional dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be

fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public.